

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)**

Bati Soengkowo, SE, M.Si, A.kt¹
Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur
Kisaran, Sumatera Utara 21216 Indonesia

ABSTRAK

Bati Soengkowo, SE, M.Si, A.kt, Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Populasi penelitian ini adalah 26 (dua puluh enam) Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera utara dengan jumlah sampel 17 (tujuh belas) dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Variabel dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan dan parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, baik Tingkat I maupun Tingkat II. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi.

(Scumpeter, 1961 dalam Budiono 1992:48) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah suatu sumber kenaikan output.

Salah satu komponen yang mempengaruhi kenaikan output tersebut adalah pengeluaran pemerintah. (Syafriзал, 1997:27-38 dalam Adi 2006) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah

harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan).

Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah Belanja Modal. Keberadaan Anggaran Belanja Modal yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah, apabila dibandingkan dengan investasi swasta nilainya relatif kecil meskipun demikian dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Melihat pertumbuhan ekonomi sebagaimana tergambar dalam PDRB Propinsi Sumatera Utara periode 2005-2007 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun tahun 2005 sebesar 5,48%, tahun 2006 sebesar 6,20% dan tahun 2007 sebesar 6,90% dan cenderung mengalami kenaikan. Angka rata-rata pertumbuhan 6,19% selama periode 2005-2007 merupakan angka pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Angka 6,19 termasuk rendah apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di wilayah lain utamanya di wilayah Jawa. Sumatera Utara merupakan propinsi yang PDRB terbesar ketujuh yaitu 181,82 trilyun atau 5,16 % dari 33 propinsi di Indonesia.(BPS, 2008).

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Belanja modal di Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2004 – 2005 cenderung meningkat, tahun 2004 sebesar 321,68 milyar, tahun 2005 sebesar 3,46,21 milyar, dan tahun 2006 sebesar 754,80 miliar. Peningkatan ini dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin naik. Penggunaan variabel Belanja Modal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alasan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan meliputi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dengan diberlakukannya system desentralisasi fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2004-2006 cenderung meningkat tahun 2004 sebesar 1.143,1 milyar, tahun 2005 sebesar 1.361,8 milyar, dan tahun 2006 sebesar 1502,6 milyar (BPS Sumut), kenaikan ini menunjukkan pemkab/pemko di Sumatera utara mampu menggali potensi yang ada didaerahnya masing-masing walaupun masih ada di beberapa pemkab/pemko yang belum mampu menaikan PADnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan

meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita.

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ?

II. Tinjauan Pustaka

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002).

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke

tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %.

Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kurang mampuan daerah dalam mengelolah sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Djojohadikusumo, 1994).

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Abimanyu, 2005)

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro,

2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002).

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004).

Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

III. Metode Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 (tujuh belas) pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dari populasi 26 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*.

Prosedur pengambilan data menggunakan data *pooling*, realisasi penerimaan PAD dan pertumbuhan

ekonomi selama 3 Tahun dari 17 Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

Penulis menganalisis data dengan metode analisis regresi berganda, dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belj_Modal_X1	51	14.08	215.67	64.2937	45.91278
PAD_X2	51	2.76	312.86	31.1457	65.47867
PDRB_Y	51	2.63	7.78	5.1929	1.07747
Valid N (listwise)	51				

Sumber : Lampiran 2 (data diolah SPSS).

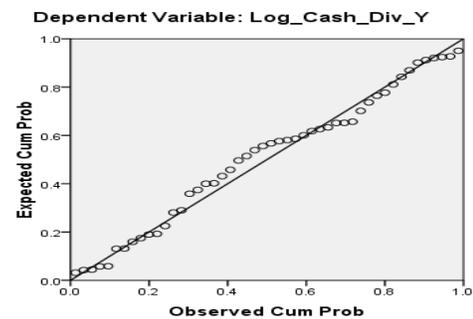
Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 51, dimana rata-rata jumlah Belanja Modal Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 64.2937 Milyar Rupiah dengan jumlah Belanja Modal terendah 14.08 Milyar Rupiah dan tertinggi sebanyak 215.67 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 45.91 dari rata - rata. Rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 31.1457 Milyar Rupiah dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah sebesar 2.76 Milyar Rupiah dan tertinggi sebanyak 312.86 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 65.47867 dari rata - rata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan Pemda/Pemko menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan guna untuk membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah. Secara keseluruhan PAD Propinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah secara pesat.

Untuk pertumbuhan ekonomi yang diproxikan dengan PDRB harga Konstan rata – rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7.78 Milyar Rupiah dengan jumlah pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 2.63 Milyar Rupiah dan tertinggi sebesar 7.78 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 1.077 dari rata – rata. Dengan melihat angka laju pertumbuhan PDRB pada suatu daerah maka dapat memberikan suatu gambaran bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh daerah tersebut.

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1 : Grafik Normalitas Data

Berdasarkan pada Gambar 1 tersebut Gozali (2005) menyatakan jika distribusi data adalah normal, maka terdapat titik titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Hasil grafik tersebut terlihat bahwa titik titik yang menyebar disekitar garis diagonalnya maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Statistik

Tabel 4.2
Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.91190970
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.058
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)		.263

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Lampiran 2. Hasil Output SPSS 16.

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 5.3 tersebut terlihat besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov adalah 1.006 dan signifikansinya pada 0.263 dan nilainya jauh diatas $\alpha = 0.05$. Suatu model dikatakan berdistribusi normal, jika nilai signifikan dari Kolmogorov- Smirnov lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu model ini dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Belj_Modal_X1	.495	2.021
PAD_X2	.495	2.021

Dependent Variabel : PDRB_Y

Sumber : Lampiran 2 Hasil Output SPSS 16.

Dari Tabel 4 diatas, terlihat bahwa variabel independen yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah angka 10 (Ghozali, 2005 : 93). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk ke 2 (dua) variabel independent diatas tidak terdapat persoalan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.811	.343		-2.364	.026
Belj_Modal_X1	.001	.006	.046	.160	.874
PAD_X2	-.004	.004	-.318	-1.104	.279

a. Dependent Variable: Ln_Res

Jika koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi Homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Hasil yang terlihat pada Tabel 5 menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independent tidak ada yang signifikan (Belanja Modal dengan tingkat signifikansi 0.874 dan PAD dengan tingkat signifikansi 0.279). Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	.533 ^a	.284	1.567

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1

b. Dependent Variable: PDRB_Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS.

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,567, maka disimpulkan bahwa **tidak terjadi autokorelasi** baik **positif** maupun **negatif** (masih dalam kisaran angka D-W -2 dan +2).

Hasil Analisis

Tabel 4.6
Pengujian Kelayakan Model

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533 ^a	.284	.254	.93071

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1

b. Dependent Variable: PDRB_Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Nilai *Adjusted R Square* pada Tabel 7 diatas sebesar 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa 25,4 % variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sisanya sebesar 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil uji hipotesis, selanjutnya dilakukan uji signifikan. Uji signifikan dibedakan atas uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji t) dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.7
Hasil Regresi Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.468	2	8.234	9.505	.000 ^a
	Residual	41.579	48	.866		
	Total	58.047	50			

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1

b. Dependent Variable: PDRB_Y

Dari Tabel 8 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 9,505 sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 6,07. Hal ini berarti bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,505 > 6,07$). Hal ini memberikan arti bahwa variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera ditolak (H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima).

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 4.8
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.817	.246		19.600	.000
Belj_Modal_X1	.002	.004	.091	.526	.601
PAD_X2	.008	.003	.464	2.671	.010

a. Dependent Variable: PDRB_Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS.

Dari Tabel 9 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda berikut :

$$Y = 4,817 + 0,002X_1 + 0,008X_2 + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna :

1. Nilai konstanta sebesar 4.817 artinya apabila nilai variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai nol, maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 4.817 satuan.
2. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.002, artinya setiap penambahan 1 satuan Belanja Modal maka akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.002 satuan.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.008, artinya setiap penambahan 1 satuan variabel PAD akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.008 satuan.

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa variabel independen Belanja Modal/ X_1

(0,526 < 2,000) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di Sumatera Utara dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Dengan demikian menolak H_1 dan menerima H_0 . Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) dengan arah positif (2,671 > 2,000) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di Sumatera Utara dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Pembahasan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat diterima.

Dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1999) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Hal ini disebabkan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar.

Investasi pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam belanja modal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Dana tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Dana pembangunan juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output.

Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD.

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan perekonomian. Transfer dapat meningkatkan belanja daerah yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera, dengan demikian hipotesis yang dikemukakan dimuka diterima. Gambaran ini mengemukakan bahwa belanja modal dan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmansyah (2004) bahwa pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, penelitian Adi (2006) Belanja Pembangunan/modal mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi, Simanjuntak (2007) PAD dan Dau berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu dan penelitian Saragih (2006) menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data dan uji hipotesis penelitian serta pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Adi (2006) Bahwa pertumbuhan Ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Belanja Pembangunan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.
- b. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel Belanja Modal tidak berpengaruh dengan tingkat alpha 5 % terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Brata (2004), Simanjuntak (2007) Adi (2006) dan Saragih (2006).

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

- a. Periode pengamatan yang relatif pendek (3 tahun), yaitu periode 2004 sampai dengan 2006 sehingga diperoleh sampel dalam jumlah yang relatif kecil.
- b. Populasi penelitian ini hanya difokuskan pada Pemerintah Kabupaten/Kota pada

Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara umum misalnya mengambil sampel Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

- c. Pertumbuhan ekonomi diprosikan hanya dengan PDRB harga dasar Konstan sehingga tidak diketahui pengaruh inflasi dan perkembangan harga.

Saran

Terkait temuan analisis dan keterbatasan penelitian di atas, dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan secara general. Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel daerah di luar pulau Jawa dan Bali atau seluruh Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang.
2. Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Belanja Modal manakah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis sektoral untuk memastikan sektor belanja manakah yang meningkatkan penerimaan terbesar dan yang sebaliknya.
3. Penelitian hanya dilakukan pada era desentralisasi fiskal yaitu data tahun 2004 – 2006, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan pertumbuhan perekonomian. Penelitian dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama akan memberikan dampak dari kebijakan desentralisasi yang lebih nyata.
4. Peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi suatu daerah misalnya besarnya transfer pemerintah berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Bagi Hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu. Jakarta.
- [2] Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Akuntansi Sektor Publik, SNA VI Padang. 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- [3] BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta.
- [4] Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [5] Davey, K.J, 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Anarullah, dkk, UI-Press, Jakarta.
- [6] Devas, Nick, Brian Bunder, Anne Booth, Kenneth Devay. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan Masri Maris, UI-Press, Jakarta.
- [7] Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- [8] Ghozali, Imam dan Fuad. 2005. *Structural Equation Modelling (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54)*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- [9] Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [10] Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159.
- [11] Hanum, Nurlila, 2004, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan USU*. Medan.
- [12] Ismerdekaningsih, Herlina & Endah Sri Rahayu. 2002. *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000)*. ITB Central Library.
- [13] Jones, Bernard. 1996. *Financial Management In The Public Sector*, Mc Graw Hill Companies, England.
- [14] Keraf, Gorys, 2006, *Komposisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [15] Koswara, E, 2001, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan PARIBA, Jakarta.
- [16] Kuncoro, Mudrajat, 2000, *Ekonomi Pembangunan–Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- [17] Lewis, Blane D. 2003. Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. *Research Triangle Institute. North Carolina*. Working Paper.
- [18] Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah*. Prisma. LP3ES. Jakarta.
- [19] Mangkoesoebroto, Guritno, 1999. *Ekonomi Publik Edisi 3, Cetakan Ketujuh*, BPFE, Yogyakarta.
- [20] Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [21] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- [22] Mardiasmodan Ahmad Akhmad Makhfaih, 2000, *Perhitungan Pajak dan Restribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhr Kerjasama Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM*, (tidak di publikasikan).
- [23] Nugroho, Bhuono Agung, 2005, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [24] Rahmansyah, Amin, 2004, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi di Indonesia, Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan*, Medan.
- [25] Samuelson, Paul, 1997. *Mikroekonomi, Edisi Keempat Belas (terjemahan)*, Erlangga, Jakarta.
- [26] Saragih, Jan Waner, 2006, *Analisis Pengaruh Keuangan, Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan USU*, Medan.
- [27] Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [28] Schwalle, Daniel P. 1999. The Impact of Intergovernmental Grants on The Aggregate Public Sector. *Southern Economic Journal*. Hal : 57 – 58.
- [29] Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- [30] Simanjuntak, Daslan, 2007, *Analisis Pengaruh PAD, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis Tidak Dipublikasi, Megister Ekonomi Pembangunan USU*, Medan.
- [31] Sugiono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- [32] Syamsi, Ibnu, 1994. *Dasar Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Reneka Cipta, Jakarta.
- [33] Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government*

Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management.*